

**Dilema *Buffer State*: Analisis Kebijakan Imigrasi Meksiko di Bawah
Tekanan Diplomasi Koersif AS
The Buffer State Dilemma: Analysis of Mexican Immigration Policy Under
Pressure from US Coercive Diplomacy**

Zaskia Muth'iah Rahmadani Nasaru¹

^{1,2}Hasanuddin University; Jl. Perintis Kemerdekaan

e-mail: *¹Kianazum@gmail.com

Abstract

This journal analyzes Mexico's role as a buffer state in managing migration flows from Central America to the United States from 2017 to 2025. Due to its strategic geographical location and high economic dependence on the US, Mexico has been subject to coercive diplomatic pressure in the form of tariff threats, the Remain in Mexico policy, the Zero Tolerance policy, military deployment, and mass deportations. Using a descriptive qualitative approach and a normative analysis of policy documents and official reports, the study concludes that this external pressure has prompted Mexico to implement stricter domestic policies, including the deployment of the National Guard, the construction of migrant detention centers, and limitations on access to asylum procedures. This creates a strategic dilemma for Mexico, pitting the need to maintain bilateral stability with the US against the need to uphold national sovereignty and commitments to human rights. At the local level, these policies have led to a humanitarian crisis in border regions, increased burdens on public services, and social and political tensions. The journal emphasizes the importance of reformulating Mexico's migration policies through institutional capacity building, developing the southern regions, and taking a multilateral approach that emphasizes shared responsibility and the fair protection of migrants.

Keywords : *Buffer State, Coercive Diplomacy, Mexican migration policy.*

PENDAHULUAN

Letak geografis serta karakteristik wilayah perbatasan suatu negara memainkan peran krusial dalam menentukan dinamika politik, ekonomi, dan keamanan nasionalnya. Faktor geografis tidak hanya berfungsi sebagai penentu batas teritorial, tetapi juga secara mendalam membentuk pola-pola interaksi diplomatik, alokasi sumber daya alam, serta stabilitas internal suatu negara (SPATIALPOST, 2023). Seperti halnya dengan arus migrasi internasional yang dimana letak geografis strategis dapat menjadikan sebuah negara sebagai poros utama dalam arus perpindahan populasi global yang membawa konsekuensi multidimensi bagi kebijakan domestik dan Internasional.

Meksiko yang terletak di ujung utara Amerika Latin dan berbatasan langsung dengan Amerika Serikat lebih dari 3.000 kilometer yang membentang dari samudra pasifik hingga teluk meksiko, letak Strategis inilah yang menjadikan meksiko sebagai negara transit utama migran yang hendak menuju AS (Seelke, 2024). Sudah sejak lama hubungan

bilateral Meksiko-AS telah terjalin erat, terutama pada bidang-bidang krusial seperti perdagangan, budaya, serta kerjasama pendidikan. Namun, hubungan ini diwarnai dengan ketegangan dan tekanan yang seringkali tidak seimbang. Meksiko secara terpaksa memikul tanggung jawab migrasi yang sebenarnya merupakan kewajiban kolektif regional, mencerminkan ketimpangan dalam distribusi beban serta responsibilitas di antara negara-negara kawasan (VOA, 2021).

Fenomena migrasi lintas batas antara Meksiko dan Amerika Serikat telah berlangsung sejak abad ke-19, terutama pasca-konflik AS-Meksiko (1846-1848) yang ditandai oleh penandatanganan Perjanjian *Guadalupe Hidalgo*. Perjanjian ini tidak hanya meredefinisi batas teritorial kedua negara, tetapi juga mengubah status kewarganegaraan penduduk Meksiko yang tinggal di wilayah yang dicaplok AS. Transformasi tersebut menjadi titik awal peningkatan arus migrasi secara signifikan, terlebih pada masa *Great Wave* (1900-1920), dimana jutaan orang masuk ke AS untuk bekerja di sektor pertanian, industri, hingga pembangunan infrastruktur (Akbar, 2024). Dorongan ekonomi, ketimpangan sosial, hingga kondisi keamanan yang tidak stabil di negara asal menjadi faktor utama pendorong migrasi ini.

Pada Februari 2025, Otoritas Imigrasi AS melaporkan penurunan signifikan jumlah migran yang mencapai perbatasan bagian selatan AS dengan Meksiko, yakni hanya 11.709 orang. Angka ini menunjukkan penurunan sebesar 81% dibandingkan Januari 2025 dan 93% lebih rendah dibandingkan Februari 2024 (Isacson, 2025). Di balik penurunan tersebut, Meksiko justru mencatat 925.000 penangkapan imigran ilegal dalam delapan bulan pertama tahun 2024 (Camacho, 2024), mencerminkan peran Meksiko sebagai “penyaring utama” bagi AS. Fenomena migrasi di kawasan Amerika Utara, telah mencapai titik kritis: dimana lebih dari 2,5 juta orang berusaha memasuki AS melalui Meksiko pada 2023, dengan 60% diantaranya berasal dari luar Meksiko seperti Guatemala, Venezuela, Kuba (Seelke, 2024).

Masalah migrasi ilegal ini berdampak pada demografi dan ekonomi, sampai menimbulkan kekhawatiran terhadap keamanan nasional AS. Pemerintah AS menuduh imigran ilegal sumber masalah sosial, mulai dari perdagangan narkoba, perdagangan manusia, hingga meningkatnya angka kriminalitas. Dalam pidatonya pada kampanye 2015, Presiden Donald Trump secara eksplisit menyatakan bahwa imigran asal Meksiko membawa banyak sekali masalah, sehingga diperlukan kebijakan ketat seperti pembangunan tembok perbatasan dan program “*Remain in Mexico*”. Bagi AS, kontrol migrasi adalah prioritas keamanan dan politik domestik, sementara bagi Meksiko, tekanan

yang didapatkan untuk menjadi “tembok” justru berdampak pada penurunan kapasitas institusional dan mengorbankan kedaulatan nasional.

Meksiko secara *de facto* mulai memainkan peran sebagai *Buffer State* yang didefinisikan sebagai negara yang terletak di antara kekuatan besar, berfungsi menyerap tekanan geopolitik dan mencegah konflik langsung (Chay, 2019). Sebagai negara penyangga AS, Meksiko harus menghadang gelombang imigran dari Amerika Tengah, Karibia, dan bahkan luar benua seperti Haiti dan Afrika sebelum mereka mencapai AS (Cornelius, 2018). Posisi geografis Meksiko berbatasan dengan Guatemala di bagian selatan dan AS di utara, menjadikan Meksiko sebagai koridor transit wajib bagi 90% migran yang hendak menuju AS. Akibatnya, Meksiko harus menghadapi beban operasional, seperti pengerahan 12.000 personel militer ke perbatasan selatan, tekanan sosial ekonomi biaya penyimpanan dan pemrosesan migran, serta risiko pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) akibat penahanan massal.

Tekanan dari Amerika Serikat terhadap Meksiko menjadi semakin nyata pada penerapan program “*Remain in Mexico*” yang memaksa pencari suaka menunggu di wilayah Meksiko, ancaman tarif dan pembatasan perdagangan di bawah *United States-Mexico-Canada Agreement* (USMCA), serta retorika publik pejabat AS yang menuntut kinerja lebih dari Meksiko. Sanksi ekonomi dan syarat bantuan juga digunakan sebagai alat untuk memaksa Meksiko untuk menanggung tanggung jawab lebih besar dalam mengendalikan migran. Strategi ini merupakan upaya AS untuk memindahkan beban pengelolaan migrasi ke Meksiko, sekaligus menjaga keamanan dan stabilitas dalam negeri AS.

Dilema utama yang dihadapi Meksiko adalah antara memenuhi tekanan Amerika Serikat demi menjaga hubungan bilateral, termasuk perdagangan, investasi, dan keamanan, atau mempertahankan kepentingan nasionalnya sendiri, seperti kedaulatan, HAM, dan stabilitas internal. Kebijakan migrasi yang dirumuskan di bawah koersi politik AS seringkali bertentangan dengan nilai dan kepentingan Meksiko, menciptakan ketegangan antara peran sebagai mitra yang kooperatif atau melindungi kedaulatan nasional. Hal ini diperparah oleh kebijakan imigrasi AS berubah pada era Trump, kebijakan ketat “*Zero Tolerance*” yang memicu pemisahan paksa ribuan anak migran dari keluarganya. Di bawah tekanan untuk menghambat arus migran, Meksiko menghadapi keterbatasan infrastruktur dan sumber daya, sehingga banyak migran terjebak di kawasan perbatasan dalam kondisi rentan terhadap kekerasan dan eksploitasi. Ketimpangan relasi internasional ini menjadikan Meksiko sebagai benteng pertahanan tanpa dukungan memadai dalam perlindungan HAM.

Padahal, masalah migrasi memerlukan pendekatan kolaboratif yang berbasis pada kerangka kerja multilateral, bukan mekanisme tekanan sepihak. Studi tentang posisi Meksiko sebagai Buffer state dalam dinamika diplomasi koersif AS masih terbatas, sehingga penelitian ini akan mengungkap dampak terhadap formulasi kebijakan migrasi nasional Meksiko.

Penelitian ini akan menguraikan berbagai dinamika, ketegangan, kompromi, hingga respons kebijakan Meksiko. Fokus utama diarahkan pada periode 2017–2025, ketika ketegangan imigrasi berada pada titik puncaknya dengan menggunakan pendekatan analisis kebijakan luar negeri dan teori hubungan internasional seperti konsep *buffer state* dan *coercive diplomacy*. Lalu coba menggali lebih dalam akan strategi yang dilakukan Meksiko untuk menyeimbangkan kepentingan nasionalnya, menjaga hubungan dagang dengan AS, dan tetap mempertahankan komitmen terhadap perlindungan HAM.

METODOLOGI

Penelitian ini akan menggunakan pendekatan kualitatif dengan analisis deskriptif-kualitatif untuk menelaah kebijakan imigrasi Meksiko dalam konteks tekanan diplomasi koersif yang dilakukan oleh Amerika Serikat. Pendekatan ini dipilih karena penelitian berfokus pada pemahaman makna, dinamika kebijakan, dan interaksi diplomatik yang tidak dapat diukur secara statistik, melainkan dipahami melalui interpretasi terhadap dokumen hukum, kebijakan, pernyataan resmi, sampai literatur ilmiah terkait.

Menurut Lexy J. Moleong (2017), pendekatan kualitatif digunakan untuk memahami fenomena sosial dari sudut pandang partisipan dan menjelaskan realitas secara holistik dan mendalam. Pendekatan ini bisa memberi ruang peneliti untuk mengeksplorasi konteks hubungan antarnegara secara dinamis, khususnya dalam hal kebijakan migrasi dan tekanan diplomatik. Penelitian ini bersifat normatif, karena menelaah bahan hukum primer dan sekunder, seperti perjanjian internasional, kebijakan imigrasi Meksiko dan AS, sampai konvensi internasional tentang perlindungan migran.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka, dengan menelaah berbagai sumber data sekunder seperti dokumen resmi pemerintah Meksiko dan Amerika Serikat, kebijakan imigrasi dan pernyataan diplomatik, laporan dari lembaga internasional, artikel jurnal ilmiah dan ensiklopedia, dan sebagainya. Data yang terkumpul dianalisis secara deskriptif-kualitatif, yaitu dengan cara menguraikan dan menginterpretasi data berdasarkan kategori tematik, peran Meksiko sebagai buffer state, bentuk-bentuk tekanan diplomasi koersif, hingga dilema dan dampaknya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dinamika Kebijakan Imigrasi Meksiko sebagai Negara Buffer terhadap Arus Migrasi dari Amerika Tengah ke Amerika Serikat

Meksiko secara geografis berada di antara Amerika Tengah (Guatemala, Honduras, El Salvador) dan Amerika Serikat, menjadikannya jalur transit utama arus migrasi menuju AS. Posisi geografis ini menyebabkan Meksiko kerap menjadi titik transit yang tak terhindarkan bagi para migran, terutama yang berasal dari negara-negara Amerika Tengah. Lonjakan jumlah migran dari kawasan tersebut dipicu oleh berbagai faktor kompleks, termasuk kemiskinan struktural yang kronis, meningkatnya kekerasan akibat aktivitas geng bersenjata, ketidakstabilan politik yang berkepanjangan, serta dampak buruk dari bencana alam yang melanda negara asal. Sebagai ilustrasi, data dari Januari hingga Agustus 2023 menunjukkan bahwa lebih dari 248.000 individu tercatat melintasi wilayah Honduras dalam perjalanan mereka menuju Amerika Serikat, dengan mayoritas berasal dari negara-negara seperti Venezuela, Ekuador, Kuba, dan Haiti. Sementara itu, di sisi perbatasan Amerika Serikat, peningkatan arus migrasi ini tercermin dalam statistik resmi: pada Desember 2023, tercatat 302.034 interaksi antara aparat keamanan dengan para migran di sepanjang perbatasan barat daya, angka tertinggi dalam sejarah modern negara tersebut. Situasi ini menimbulkan tantangan besar bagi Meksiko, yang kini harus mengambil peran ganda: menjaga kedaulatan dan keamanan nasionalnya, mengelola tekanan sosial dan ekonomi domestik, serta tetap menjunjung tinggi prinsip-prinsip hak asasi manusia dalam menangani para migran.

Dalam situasi geopolitik tersebut, kebijakan imigrasi Meksiko sangat dipengaruhi oleh tekanan luar, terutama dari pemerintah AS. Selama pemerintahan Donald Trump, AS menerapkan pendekatan yang sangat ketat terhadap migrasi, termasuk kebijakan “*Zero Tolerance*” yang diberlakukan sejak Mei 2018, di mana seluruh pelanggar perbatasan ditahan tanpa pengecualian. Selain itu, pada tahun 2019 pemerintah AS meluncurkan *Migrant Protection Protocols* (MPP), yang mewajibkan para pencari suaka menunggu proses hukum mereka di wilayah Meksiko. Program ini berdampak luas dengan mencatat lebih dari 65.000 kasus (Kusnadi, 2019). Tindakan koersif juga dilakukan melalui tekanan ekonomi, seperti ancaman pengenaan tarif terhadap produk ekspor Meksiko apabila negara tersebut gagal mengendalikan arus migran. Meskipun pemerintahan Joe Biden menampilkan retorika yang lebih moderat, tekanan terhadap Meksiko tetap berlanjut. Hal ini tercermin dalam berbagai kebijakan seperti penerapan *Title 42* untuk pengusiran cepat

migran, mekanisme penjadwalan janji melalui aplikasi CBP One, dan kebijakan pembatasan akses suaka. Akibatnya, Meksiko terus didorong untuk bertindak sebagai filter migrasi ke AS. Dalam berbagai kesempatan, negara ini mengambil peran sebagai mitra strategis Washington, meskipun langkah tersebut seringkali menuntut penyesuaian kebijakan domestik demi menjaga relasi bilateral yang sensitif dan penuh tekanan.

Sebagai respons terhadap tekanan eksternal yang semakin meningkat, pemerintah Meksiko mengambil langkah tegas dengan memperkuat kontrol di wilayah perbatasan selatan. Pada pertengahan tahun 2019, Presiden Andrés Manuel López Obrador memerintahkan pengerahan sekitar 15.000 personel dari Garda Nasional serta aparat keamanan lainnya ke wilayah perbatasan selatan dan utara guna menghambat laju masuknya migran. Kebijakan ini memberikan dampak nyata terhadap arus migrasi: menurut data dari Customs and Border Protection (CBP) Amerika Serikat, jumlah penangkapan migran menurun secara signifikan dari 144.116 kasus pada bulan Mei 2019 menjadi 81.777 kasus pada Juli 2019, hanya dua bulan setelah penempatan pasukan tersebut (Kocherga, 2021). Di samping aspek keamanan, Meksiko juga memperkuat pendekatan kemanusiaan dengan membangun fasilitas penampungan bagi para migran. Pemerintah mendirikan sembilan pusat penampungan di kota-kota perbatasan strategis seperti Tijuana, Ciudad Juárez, dan Matamoros, yang difungsikan untuk menampung migran yang permintaan suakanya ditolak atau yang dikembalikan berdasarkan kebijakan *“Remain in Mexico”*. Langkah ini dilengkapi dengan berbagai bentuk bantuan kemanusiaan, termasuk pemberian kartu tunai senilai 2.000 peso kepada migran yang baru saja dideportasi serta fasilitas transportasi ke wilayah pedalaman bagi mereka yang memilih untuk kembali secara sukarela. Melalui kebijakan bertajuk *“Mexico Embraces You”* pemerintah mengakui peran ganda Meksiko sebagai jalur transit sekaligus zona penampungan sementara. Namun demikian, inisiatif ini menimbulkan tantangan besar dalam hal logistik dan kapasitas kelembagaan, yang harus dihadapi oleh otoritas perbatasan dalam situasi yang semakin kompleks.

Kebijakan penguatan pengawasan migrasi yang diadopsi oleh Meksiko membawa konsekuensi kompleks yang menciptakan dilema baru dalam pengelolaan arus migran. Kota-kota perbatasan, yang menjadi titik utama penampungan, menghadapi beban logistik dan finansial yang semakin berat akibat kedatangan ribuan migran dalam waktu relatif singkat. Kondisi ini memicu keprihatinan dari berbagai organisasi hak asasi manusia, yang menyoroti keterbatasan infrastruktur dan pelayanan di pusat-pusat penampungan. Kelompok HAM Human Rights Watch, mengkritik kebijakan *“alih daya”* penegakan

imigrasi Amerika Serikat kepada otoritas Meksiko, yang menurut mereka telah berkontribusi terhadap berbagai bentuk pelanggaran hak asasi dan membuat ratusan ribu migran terpaksa menunggu dalam kondisi yang tidak layak. Situasi di lapangan juga tercermin dalam data resmi: pada tahun 2021, otoritas Meksiko mencatat 307.569 kasus penangkapan migran, angka tertinggi sepanjang sejarah negara tersebut serta menerima 130.863 permohonan suaka, menjadikannya negara dengan jumlah permohonan tertinggi ketiga di dunia (HRW, 2022). Merespons dinamika baru, termasuk berkurangnya deportasi oleh Amerika Serikat dan penurunan signifikan arus migran menuju utara, Presiden Claudia Sheinbaum pada Maret 2025 mengumumkan rencana evaluasi terhadap pengurangan jumlah pusat migran yang dikelola negara. Langkah ini menandai perubahan pendekatan sekaligus mencerminkan tantangan kebijakan yang terus berubah. Meksiko dihadapkan pada kebutuhan untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan kemanusiaan, stabilitas keamanan nasional, dan tekanan politik eksternal dalam menyusun strategi imigrasi yang adaptif dan berkelanjutan.

Secara keseluruhan, peran Meksiko sebagai negara buffer menghasilkan dinamika kebijakan imigrasi yang rumit. Di satu sisi, Meksiko berusaha merespons tuntutan diplomatik AS dengan memperketat kontrol dan kerja sama penegakan imigrasi. Disisi lain, ia harus mempertimbangkan faktor domestik seperti keamanan nasional, keterbatasan ekonomi, dan komitmen hak asasi migran. Hasilnya adalah kebijakan yang sangat terikat pada kondisi eksternal dan agenda bilateral, dimana nilai kemanusiaan dan kedaulatan diuji di bawah tekanan koersif. Pendekatan kualitatif dalam penelitian ini menyoroti bagaimana Meksiko mencoba menyeimbangkan kepentingan nasional dengan kewajiban internasional terkait migrasi. Kajian ini memperlihatkan kompleksitas dan dilema yang dihadapi Meksiko, antara menjaga perbatasan dan memenuhi komitmen hak asasi dalam konteks hubungan diplomatik yang asimetris dengan Amerika Serikat.

Bentuk Tekanan Koersif yang Dilakukan Amerika Serikat terhadap Meksiko

Diplomasi koersif yang dijalankan oleh Amerika Serikat (AS) terhadap Meksiko dalam isu imigrasi mencerminkan strategi pemaksaan yang bertujuan menekan Meksiko agar berperan aktif dalam menahan arus migran tidak berdokumen dari kawasan Amerika Tengah menuju wilayah AS. Pendekatan ini tidak sekadar bersifat persuasif, melainkan diiringi dengan berbagai ancaman dan tekanan sistemik yang mencakup dimensi ekonomi, politik, serta aspek keamanan nasional. AS secara eksplisit menggunakan posisi hegemoninya untuk mendorong Meksiko mengambil langkah-langkah represif dan

preventif terhadap migrasi lintas batas. Beragam bentuk utama dari diplomasi koersif tersebut dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1. Ancaman Pengenaan Tarif Impor

Pada masa pemerintahan Presiden Donald Trump, Amerika Serikat secara eksplisit menggunakan instrumen ekonomi sebagai bentuk tekanan koersif terhadap Meksiko dalam isu migrasi. Salah satu tindakan paling mencolok adalah ancaman penerapan tarif impor secara progresif, dimulai dari 5% dan berpotensi meningkat setiap bulan hingga mencapai 25% atas seluruh produk asal Meksiko. Ancaman tersebut dilontarkan secara terbuka pada saat krusial, yaitu ketika proses ratifikasi Perjanjian Dagang Amerika Utara yang diperbarui *United States-Mexico-Canada Agreement* (USMCA) masih berlangsung. Situasi ini memicu ketegangan serius dalam hubungan dagang bilateral antara AS dan Meksiko. Di bawah tekanan tersebut, pemerintah Meksiko merespons dengan langkah sigap, termasuk memperketat kontrol di wilayah perbatasan selatan dan mengerahkan personel Garda Nasional serta pasukan keamanan tambahan untuk menahan masuknya migran tidak berdokumen (Holland & Daniel, 2019). Strategi tekanan ekonomi tersebut terbukti efektif dalam mendorong keterlibatan aktif Meksiko dalam pengelolaan arus migrasi. Presiden Andrés Manuel López Obrador secara terbuka menyatakan komitmennya untuk memperkuat pengawasan di wilayah selatan sebagai upaya menghindari potensi konflik dagang dengan Amerika Serikat. Tindakan ini memperlihatkan bagaimana ancaman ekonomi dapat digunakan sebagai alat diplomasi koersif yang berdampak langsung terhadap kebijakan domestik negara mitra.

2. Kebijakan “Zero Tolerance” dan Pemisahan Keluarga

Penerapan kebijakan “Zero Tolerance” pemerintah Amerika Serikat pada tahun 2018 menandai pendekatan represif terhadap imigrasi ilegal, di mana seluruh individu yang melintasi perbatasan tanpa izin, termasuk keluarga migran, ditindak secara hukum. Salah satu aspek paling kontroversial dari kebijakan ini adalah praktik pemisahan anak-anak migran dari orang tua mereka, yang memicu reaksi keras dari komunitas internasional serta menimbulkan tekanan moral yang signifikan terhadap Meksiko sebagai negara transit. Pemerintah Meksiko secara terbuka mengutuk kebijakan pemisahan keluarga tersebut, menyebutnya sebagai tindakan yang kejam dan tidak manusiawi. Bahkan, Jaksa Agung AS saat itu, Jeff Sessions, mengakui bahwa kebijakan tersebut secara langsung mengakibatkan

pemisahan ribuan keluarga pencari suaka di fasilitas penahanan perbatasan (Ramadhan, 2018). Meskipun kebijakan ini berasal dari ranah domestik AS, dampaknya meluas menjadi bentuk tekanan koersif melalui opini publik global. Penyebaran foto dan laporan media tentang anak-anak migran yang ditempatkan di pusat penampungan di AS menimbulkan gelombang kritik internasional dan menciptakan tekanan politik tersendiri bagi Meksiko. Sebagai respons terhadap situasi tersebut, pemerintah Meksiko melonggarkan prosedur permohonan suaka dan meningkatkan kapasitas penampungan sementara untuk para migran. Kebijakan ini diambil sejalan dengan desakan dari pihak AS agar Meksiko turut berperan lebih aktif dalam mengendalikan migrasi dari wilayah Amerika Tengah secara lebih ketat dan sistematis.

3. Penggunaan Militer dan Deportasi Massal

Amerika Serikat juga menerapkan pendekatan militer dalam menangani persoalan migrasi lintas batas, menegaskan eskalasi kebijakan koersif terhadap negara-negara tetangganya. Pada tahun 2025, di bawah kepemimpinan Presiden Trump, pemerintah AS kembali mengerahkan ribuan personel militer aktif ke sepanjang perbatasan selatan, termasuk unit elit seperti Divisi Lintas Udara ke-82. Selain itu, militer AS menggunakan pesawat angkut strategis C-17 untuk mempercepat proses deportasi terhadap migran tidak berdokumen ke negara asal mereka. Tercatat, dua pesawat C-17 dilaporkan telah mengangkut puluhan migran kembali ke Guatemala setelah mereka ditahan di wilayah AS (Ali & Stewart, 2025). Pendekatan ini mencerminkan intensitas dan keseriusan AS dalam memperketat kontrol perbatasan melalui kekuatan militer. Bagi Meksiko, kehadiran pasukan bersenjata AS di dekat wilayah perbatasan serta deportasi dalam skala besar menciptakan tekanan politik dan diplomatik tambahan. Pemerintah di Kota Meksiko kemudian mengambil langkah-langkah penyesuaian, termasuk memperketat penahanan terhadap migran gelap yang berada di wilayahnya, serta memberikan tempat penampungan bagi warga Amerika Tengah guna mencegah pengiriman kembali ke wilayah AS. Tindakan tersebut merupakan strategi kompromi yang diambil untuk meredam risiko konfrontasi langsung dengan kekuatan militer AS, sembari tetap mempertahankan hubungan diplomatik yang fungsional.

4. Kerja Sama Operasi Anti-Penyelundupan dan Penegakan Hukum Bersama

Amerika Serikat dan Meksiko menjalin kerja sama strategis dalam upaya memberantas jaringan penyelundupan manusia yang beroperasi di sepanjang jalur migrasi. Kolaborasi ini mencakup peningkatan intensitas patroli di wilayah perbatasan, pertukaran informasi intelijen yang lebih sistematis, serta perluasan protokol perlindungan bagi kelompok migran yang tergolong rentan. Namun, di balik kerja sama ini, terdapat dinamika diplomasi koersif, di mana Amerika Serikat mengaitkan pemberian bantuan ekonomi serta kelancaran hubungan dagang dengan kesediaan Meksiko untuk memperkuat kontrol migrasi. Salah satu contohnya terlihat pada perjanjian bilateral yang disepakati pada pertengahan tahun 2019, yang mencakup paket dukungan pembangunan dan subsidi langsung bagi program-program anti-penyelundupan di Meksiko. Tujuan dari paket tersebut adalah mendorong keterlibatan lebih aktif dari pihak Meksiko dalam menghambat pergerakan migran tidak berdokumen menuju wilayah AS (Sugiati, 2022). Dengan demikian, kerja sama dalam bidang penegakan hukum yang tampak bersifat teknokratis ini pada kenyataannya juga menjadi instrumen tekanan politik dan ekonomi. Keberlanjutan bantuan dari pihak AS secara implisit bergantung pada sejauh mana Meksiko berhasil menekan arus migrasi lintas batas, menjadikan kerja sama bilateral ini sebagai bagian dari strategi pengaruh yang bersifat asimetris.

5. Perubahan Kebijakan Imigrasi AS yang Mempengaruhi Meksiko

Perubahan kebijakan imigrasi yang mendadak dan tidak terprediksi dari pihak Amerika Serikat turut memberikan tekanan signifikan terhadap kapasitas domestik Meksiko dalam mengelola isu migrasi. Salah satu contoh utama adalah kebijakan *Remain in Mexico* atau *Migrant Protection Protocols* (MPP), yang diberlakukan secara sepihak oleh pemerintahan Trump. Melalui kebijakan ini, puluhan ribu pencari suaka diwajibkan menunggu proses hukum imigrasi mereka di wilayah Meksiko alih-alih di Amerika Serikat. Kebijakan tersebut secara praktis mengalihkan tanggung jawab penanganan pengungsi ke otoritas Meksiko, yang dipaksa melakukan penyesuaian sistem secara cepat dan ekstensif (American Immigration Council, 2024). Selain itu, rencana pembangunan tembok pembatas serta berbagai wacana pembatasan visa termasuk pemangkasan pendanaan untuk program visa kerja sering kali diumumkan tanpa peringatan dan mengalami perubahan mendadak. Kondisi ini menempatkan Meksiko dalam posisi sulit, memaksanya untuk merespons secara cepat melalui reformasi kebijakan domestik agar tetap selaras dengan tekanan dan ekspektasi dari pihak AS. Tindakan responsif

tersebut mencakup peningkatan jumlah personel imigrasi, pembangunan kamp-kamp pengungsi sementara, serta revisi terhadap peraturan dan prosedur suaka. Langkah-langkah ini diambil sebagai bentuk mitigasi terhadap risiko krisis kemanusiaan maupun ketegangan politik yang dapat timbul akibat ketidakstabilan kebijakan migrasi dari mitra utamanya di utara.

Dilema dan Dampak Sosial-Politik yang dihadapi Meksiko Akibat Peran sebagai Buffer State di bawah Tekanan Diplomasi Koersif AS

Sebagai garis depan geografis yang berfungsi sebagai penyangga antara Amerika Tengah dan Amerika Serikat, Meksiko dihadapkan pada dilema strategis yang kompleks: bagaimana menyeimbangkan tekanan keras dari diplomasi Amerika Serikat dengan kepentingan domestik dan stabilitas nasionalnya. Salah satu bentuk tekanan tersebut terwujud dalam kebijakan *Migrant Protection Protocols* (MPP), atau yang dikenal sebagai “*Remain in Mexico*” yang mewajibkan puluhan ribu pencari suaka untuk menunggu proses hukum mereka di kota-kota perbatasan wilayah Meksiko. Pada tahun 2019, di tengah ancaman dari Presiden Trump untuk memberlakukan tarif impor sebesar 5% yang bahkan dapat ditingkatkan secara bertahap hingga 25% pemerintah Meksiko mengambil langkah responsif dengan mengerahkan sekitar 6.000 personel dari Garda Nasional ke wilayah perbatasan selatan sebagai upaya menahan gelombang migrasi (Palmer et al., 2019). Tidak hanya itu, AS juga memperluas cakupan MPP ke seluruh sektor perbatasan barat daya, sehingga seluruh pemohon suaka yang memasuki AS melalui jalur tidak resmi secara otomatis dipulangkan ke Meksiko untuk menunggu proses hukum. Skema semacam ini secara de facto menjadikan Meksiko sebagai negara penyangga migrasi bagi Amerika Serikat. Sementara itu, hampir 90% dari total ekspor Meksiko ditujukan ke pasar AS (Abed & Armijo, 2021), yang menjadikan hubungan dagang bilateral tersebut sangat vital. Ketergantungan ekonomi ini memunculkan konflik kepentingan yang tajam: di satu sisi, Meksiko perlu menjaga kemitraan strategis dengan AS, sementara di sisi lain, negara ini juga berkewajiban melindungi kedaulatan nasional serta menjaga reputasi dan komitmennya terhadap prinsip-prinsip hak asasi manusia.

1. Dampak Sosial dan Kemanusiaan

Implementasi kebijakan *Remain in Mexico* telah menyebabkan ribuan pencari suaka terjebak dalam situasi yang sangat rentan di wilayah perbatasan Meksiko. Berdasarkan laporan dari Physicians for Human Rights, tercatat sebanyak 69.333 pencari suaka terpaksa menetap di kota-kota perbatasan Meksiko sejak kebijakan ini diberlakukan. Para migran ini hidup dalam kondisi yang tidak

layak dan rawan kekerasan, di mana peningkatan signifikan dalam aksi kriminal seperti penculikan, pemerkosaan, dan pemerasan oleh kelompok kartel mencerminkan lemahnya perlindungan terhadap populasi ini. Migran kerap dipandang sebagai sasaran empuk oleh jaringan kejahatan terorganisir karena status hukum mereka yang tidak pasti dan akses terbatas terhadap perlindungan hukum. Akibatnya, angka pembunuhan di beberapa negara bagian perbatasan Meksiko mencapai rekor tertinggi dalam beberapa dekade terakhir. Laporan PHR juga menunjukkan bahwa infrastruktur penampungan dan layanan publik di wilayah tersebut mengalami tekanan berat, terutama karena keterbatasan kapasitas dalam menghadapi lonjakan jumlah migran (Hampton, 2021). Kawasan perbatasan secara fungsional berubah menjadi “ruang tunggu” kebijakan suaka AS, sementara lembaga-lembaga bantuan kemanusiaan seperti tempat penampungan, klinik keliling, dan pusat integrasi dipaksa bekerja melebihi kapasitasnya untuk menangani krisis yang terus memburuk. Ketika pandemi COVID-19 melanda, kondisi menjadi semakin genting, dengan sanitasi yang buruk, terbatasnya akses terhadap pelayanan kesehatan, serta meningkatnya insiden kekerasan dan eksploitasi, termasuk perdagangan manusia dan perbudakan tenaga kerja.

Ketegangan sosial turut meningkat secara signifikan di berbagai kota perbatasan seperti Tijuana, Ciudad Juárez, dan Matamoros. Penduduk lokal yang sebelumnya jarang berinteraksi dengan populasi migran, kini dihadapkan pada realitas baru: harus berbagi fasilitas umum dan ruang sosial dengan puluhan ribu pendatang. Lonjakan mendadak dalam permintaan terhadap layanan publik terutama di sektor kesehatan, pendidikan, dan keamanan menimbulkan ketidakpuasan masyarakat dan menciptakan tekanan politik terhadap pemerintah lokal. Sebagian komunitas bahkan menyuarakan penolakan terhadap kehadiran migran dalam jumlah besar, disertai dengan munculnya sentimen xenofobia. Tuntutan agar otoritas setempat memprioritaskan penduduk asli semakin mengemuka, terutama di tengah persepsi bahwa kehadiran migran memperburuk kondisi sosial dan meningkatkan angka kejahatan. Dalam beberapa kasus, protes warga menentang pembangunan kamp-kamp migran mencerminkan resistensi sosial yang kian menguat. Meskipun data statistik resmi mengenai persepsi publik terhadap migran masih terbatas, berbagai laporan media dan pengamatan lapangan menunjukkan adanya tren peningkatan sikap anti-migran di sejumlah wilayah perbatasan. Secara keseluruhan, dimensi kemanusiaan dari kebijakan koersif AS

terhadap migrasi justru membebani Meksiko secara sosial dan ekonomi, sekaligus mengganggu keseimbangan sosial yang rapuh di kawasan perbatasan (Hampton, 2021).

2. Dampak Politik dan Ekonomi

Dinamika kebijakan migrasi yang didorong oleh tekanan eksternal dari Amerika Serikat turut membawa dampak signifikan terhadap politik domestik di Meksiko. Di bawah kepemimpinan Presiden Andrés Manuel López Obrador, pemerintah Meksiko berupaya menyeimbangkan dua kepentingan yang saling bertentangan: menjaga citra internasional sebagai negara yang menjunjung tinggi hak asasi manusia, sekaligus memenuhi tuntutan AS untuk menekan arus migrasi demi stabilitas ekonomi nasional. Ketergantungan Meksiko terhadap pasar ekspor AS sangat tinggi sekitar 90% dari total ekspor nasional mengalir ke Amerika Serikat sehingga penolakan terhadap kebijakan atau tekanan dari Washington berisiko menimbulkan guncangan ekonomi yang besar (Abed & Armijo, 2021). Ancaman pengenaan tarif serta pengurangan bantuan ekonomi AS kepada negara-negara Amerika Tengah telah memaksa Meksiko untuk mengadopsi kebijakan yang lebih restriktif terhadap migran. Misalnya, setelah perjanjian bilateral yang dicapai pada Juni 2019, Meksiko menyepakati langkah-langkah untuk menahan dan mendeportasi sebagian migran. Meskipun kebijakan ini dianggap strategis dalam konteks diplomasi, sejumlah kelompok pegiat hak asasi manusia mengecamnya sebagai bentuk pengkhianatan terhadap prinsip solidaritas regional dan perlindungan migran.

Di tingkat domestik, kebijakan tersebut memicu polarisasi politik yang tajam. Kelompok-kelompok pendukung HAM dan advokasi migran mengkritik kebijakan pengetatan sebagai tidak manusiawi dan tidak menawarkan solusi jangka panjang terhadap persoalan migrasi struktural. Sebaliknya, kelompok nasionalis dan pendukung pemerintah justru memandang tindakan tersebut sebagai bagian dari kedaulatan negara dalam menjaga perbatasan dan keamanan nasional. Dalam analisisnya, Andrew Selee dari *Americas Quarterly* menyebut bahwa peran Meksiko sebagai negara penyangga migrasi bersifat sementara dan tidak akan memberikan solusi berkelanjutan tanpa reformasi mendalam terhadap sistem suaka di kedua negara (Selee, 2019). Selain itu, kebijakan ini juga menciptakan ruang manuver bagi partai oposisi untuk memanfaatkan isu migrasi dalam wacana politik, baik dengan menuding pemerintah gagal melindungi hak migran maupun

karena dianggap terlalu patuh terhadap tekanan asing dalam mengamankan perbatasan.

Dari sisi ekonomi, beban terbesar ditanggung oleh kota-kota perbatasan yang harus mengalokasikan dana lokal untuk penyediaan layanan dasar bagi ribuan migran yang tertahan. Di tingkat nasional, pemerintah pusat Meksiko dihadapkan pada dilema fiskal ganda: membiayai pengamanan dan infrastruktur penampungan migran, sambil tetap mempertahankan stabilitas ekonomi makro. Ketegangan antara pemerintah pusat dan daerah pun mencuat, karena otoritas lokal merasa dibebani oleh kebijakan federal yang sebagian besar didesain untuk memenuhi ekspektasi dari Washington. Situasi serupa juga terjadi di perbatasan selatan Meksiko, khususnya di wilayah yang berbatasan dengan Guatemala. Untuk membendung migrasi dari arah selatan, pemerintah mengerahkan sekitar 9.000 anggota Garda Nasional, langkah yang menuai kritik politik mengenai legalitas dan legitimasi penggunaan kekuatan dalam mengontrol pergerakan manusia lintas batas (Abed & Armijo, 2021). Keseluruhan dinamika ini menunjukkan bahwa tekanan migrasi tidak hanya berdampak pada hubungan internasional Meksiko, tetapi juga mengubah lanskap politik dan kebijakan domestik secara signifikan.

3. Kebijakan Domestik Meksiko

Merespons situasi, pemerintah Meksiko meluncurkan sejumlah kebijakan domestik. Pada 2019 Meksiko menerbitkan undang-undang imigrasi baru yang lebih liberal, tapi penerapannya lebih ketat seiring tekanan AS. Secara konkret, Meksiko mengerahkan sekitar 6.000–9.000 pasukan Penjaga Nasional untuk mengawasi perbatasan selatan, melakukan razia migran dan memulangkan mereka ke negara asal jika perlu (Abed & Armijo, 2021). Operasi besar-besaran bus migran ke wilayah selatan juga dilakukan agar migran jauh dari AS. Pusat-pusat integrasi migran (Centros Integradores para Migrantes) juga didirikan di perbatasan utara untuk menampung sementara migran yang dipulangkan (Reyez & Pombo, 2023). Pemerintah meningkatkan sumber daya di penampungan dan klinik migran serta menerbitkan izin kerja sementara bagi beberapa kelompok migran,

Dalam konteks diplomasi domestik, Meksiko juga berupaya mendialogkan isu ini di dalam negeri. Presiden López Obrador menyatakan akan mengubah konsulat Meksiko menjadi “lembaga ombudsman” yang membela hak migran di luar negeri (Masferrer & Pedroza, 2022). Di tingkat kebijakan, pemerintah mengarahkan bantuan sosial dan penciptaan lapangan kerja ke kawasan selatan

Meksiko (melalui program pembangunan regional) untuk mengurangi migrasi keluar. Rencana pembangunan nasional mencakup strategi berkelanjutan dan pemerataan kesejahteraan, walaupun realisasinya masih terbatas menghadapi krisis migrasi yang terus berkembang.

4. Upaya Diplomasi Alternatif

Selain menerapkan kebijakan domestik yang bersifat responsif terhadap tekanan eksternal, Meksiko juga mengembangkan strategi diplomasi alternatif sebagai bagian dari upaya jangka panjang untuk mengelola dinamika migrasi. Mengingat posisinya sebagai mitra dagang utama Amerika Serikat, pemerintah Meksiko secara konsisten mendorong dialog bilateral yang lebih seimbang melalui perundingan strategis. Sejumlah studi kebijakan menyarankan agar Meksiko memanfaatkan momentum transisi kekuasaan di AS—baik pada era Biden maupun pemerintahan Trump yang baru—untuk memperkuat posisi negosiasi. Salah satu langkah konkret yang disoroti adalah penguatan peran lembaga diplomatik, seperti konsulat dan perwakilan imigrasi Meksiko, dalam memberikan perlindungan bagi warganya yang berada di AS serta mengadvokasi hak-hak migran dalam kerangka hukum internasional.

Di tingkat regional, Meksiko juga mendorong pendekatan kolektif dengan menggandeng negara-negara di kawasan Amerika Tengah. Amerika Serikat sendiri telah mengalokasikan lebih dari US\$4 miliar untuk mendanai program pembangunan di El Salvador, Guatemala, dan Honduras sebagai bagian dari strategi untuk menangani akar struktural penyebab migrasi, seperti kemiskinan, kekerasan, dan ketidakstabilan (Palmer et al., 2019). Dalam konteks ini, Meksiko mengusulkan pembentukan mekanisme kerja sama trilateral yang melibatkan Komisi Ekonomi untuk Amerika Latin dan Karibia (CEPAL) serta negara-negara di kawasan Segitiga Utara (Triángulo Norte). Tujuan utama dari inisiatif ini adalah meningkatkan stabilitas ekonomi dan keamanan domestik di negara-negara asal migran (Masferrer & Pedroza, 2022). Strategi ini juga mencakup rencana pembangunan terarah serta pembentukan skema visa kerja legal bagi warga Amerika Tengah, sebagai alternatif terhadap pendekatan represif. Dengan demikian, Meksiko dan AS dapat bersama-sama membangun jalur migrasi yang aman, legal, dan tertata. Di tingkat internasional, Meksiko juga aktif dalam advokasi multilateral melalui forum-forum seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan Organisasi Negara-Negara Amerika (OAS), guna mendorong distribusi

tanggung jawab perlindungan terhadap pengungsi secara global dan menghindari beban yang timpang di negara-negara transit seperti Meksiko (Selee, 2019).

KESIMPULAN

Meksiko, sebagai negara penyangga antara Amerika Tengah dan Amerika Serikat, menghadapi tekanan diplomatik koersif berupa ancaman tarif, kebijakan *Zero Tolerance*, dan *Migrant Protection Protocols*. Tekanan ini memicu krisis kemanusiaan, ketegangan sosial-ekonomi, dan polarisasi politik domestik. Oleh karena itu, Meksiko perlu mereformasi kebijakan migrasinya dengan memperkuat institusi suaka, layanan publik, dan pembangunan kawasan selatan, serta mendorong diplomasi multilateral untuk distribusi tanggung jawab yang lebih adil. Di sisi lain, AS disarankan beralih ke pendekatan kolaboratif berbasis pembangunan dan migrasi legal.

DAFTAR PUSTAKA

Abed, Lila, and Jorge Armijo. 2021. "US-Mexico cooperation & the future of the bilateral relationship." Latino Public Policy Foundation.

<https://www.latinopublicpolicy.org/2021/04/us-mexico-cooperation-the-future-of-the-bilateral-relationship>.

Akbar, Alif. 2024. *KERJASAMA AMERIKA SERIKAT DAN MEKSIKO DALAM PENANGANAN KRISIS MIGRASI DI PERBATASAN TAHUN 2018 - 2020*.

Ali, Idrees, and Phil Stewart. 2025. "US military aircraft deport migrants as Pentagon readies more troops for border." Reuters.

<https://www.reuters.com/world/americas/us-military-aircraft-deport-migrants-pentagon-readies-more-troops-border-2025-01-24>.

American Immigration Council. 2024. "The "Migrant Protection Protocols": an Explanation of the Remain in Mexico Program." American Immigration Council.

<https://www.americanimmigrationcouncil.org/fact-sheet/migrant-protection-protocols/>.

Camacho, Pedro. 2024. "Analysts Praise Mexico's Role as 'A Buffer Between the U.S. And Central America,' but Warn About the Long Term." THE LATIN TIMES. <https://www.latintimes.com/analysts-praise-mexicos-role-buffer-between-us-central-america-warn-about-long-term-568859>.

Chay, John. 2019. *Buffer States in World Politics*. N.p.: Routledge. https://books.google.co.id/books?hl=en&lr=&id=Vd6iDwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PT8&dq=buffer+state&ots=tDlZIH88yF&sig=_ryNU1EpGZkOAn6BTZ17MOEVGFY&redir_esc=y#v=onepage&q=buffer%20state&f=false.

Cornelius, Wayne. 2018. "Mexico: From Country of Mass Emigration to Transit State." IDB. <http://dx.doi.org/10.18235/0001415>.

Hampton, Kathryn. 2021. "Forced into Danger: Human Rights Violations Resulting from the U.S. Migrant Protection Protocols - PHR." Physicians for Human Rights. <https://phr.org/our-work/resources/forced-into-danger/>.

Holland, Sreve, and Frank J. Daniel. 2019. "Trump vows rapid, high tariffs on Mexico unless illegal immigration ends." Reuters. <https://www.reuters.com/article/world/trump-vows-rapid-high-tariffs-on-mexico-unless-illegal-immigration-ends>.

HRW. 2022. "Mexico: Asylum Seekers Face Abuses at Southern Border." Human Rights Watch. <https://www.hrw.org/news/2022/06/06/mexico-asylum-seekers-face-abuses-southern-border>.

Isacson, Adam. 2025. "Weekly U.S.-Mexico Border Update: February migration, ICE arrests, Guantánamo empties, Panama releases - WOLA." Washington Office on Latin America | WOLA. <https://www.wola.org/2025/03/weekly-u-s-mexico-border-update-february-migration-ice-arrests-guantanamo-empties-panama-releases/>.

Kocherga, Angela. 2021. "Two Years In, Mexico National Guard's Role On The Border Remains Controversial." KERANews. <https://www.keranews.org/texas-news/2021-06-08/two-years-in-mexico-national-guards-role-on-the-border-remains-controversial>.

Kusnadi, Felicia. 2019. *Diplomasi Amerika Serikat Terhadap Meksiko dalam Menangani Isu Imigrasi di Perbatasan Era Presiden Trump*. Bandung: UNPAR. <https://repository.unpar.ac.id/bitstream/handle/123456789/10659>.

- Masferrer, Claudia, and Luicy Pedroza, eds. 2022. *The Intersection of Foreign Policy and Migration Policy in Mexico Today*. N.p.: El Colegio de México.
<https://migdep.colmex.mx/publicaciones/foreign-migration-policy-report.pdf>.
- “Meksiko Ingin Perjanjian Migrasi Regional dengan AS.” 2021. VOA INDONESIA. <https://www.voaindonesia.com/a/meksiko-inginkan-perjanjian-migrasi-regional-dengan-as/6240260.html>.
- Palmer, Doug, Adam Behsudi, and Ted Hesson. 2019. “Trump drops tariff threat on Mexico after migration deal reached.” Politico.
<https://www.politico.com/story/2019/06/07/mexico-troops-southeastern-border-1514223>.
- Palmer, Doug, Adam Behsudi, and Ted Hesson. 2019. “Trump drops tariff threat on Mexico after migration deal reached.” Politico.
<https://www.politico.com/story/2019/06/07/mexico-troops-southeastern-border-1514223>.
- Ramadhan, Bilal. 2018. “Meksiko: Kebijakan Pemisahan Keluarga Imigran Trump Rasis.” International Republika.
<https://internasional.republika.co.id/berita/pamh12330/meksiko-kebijakan-pemisahan-keluarga-imigran-trump-rasis>.
- Reyez, Emilio A., and Maria D. Pombo. 2023. “Estudios Fronterizos.” *Humanitarian infrastructures in the border cities of Ciudad Juárez and Tijuana* 24, no. 130 (October). <https://doi.org/10.21670/ref.2319130>.
- Seelke, Clare R. 2024. “Mexico’s Migration Control Efforts.” Congressional Research Service. <https://sgp.fas.org/crs/row/IF10215.pdf>.
- Selee, Andrew. 2019. “Trump’s Deal with Mexico May Slow Migration, But Not for Long.” AMERICAS QUARTERLY.
<https://www.americasquarterly.org/article/trumps-deal-with-mexico-may-slow-migration-but-not-for-long/>.
- SPATIALPOST. 2023. “How Does Geography Affect Politics: Exploring the Complex Relationship.” Spatial Post. <https://www.spatialpost.com/how-does-geography-affect-politics/>.
- Sugiati, Cristy. 2022. “Global Insight Journal.” *Analisa Kebijakan Luar Negeri Amerika Serikat Terhadap Imigran Ilegal Meksiko Dalam Isu Perbatasan Pada Tahun 2017-2019* 07 (02).

“Why Six Countries Account for Most Migrants at the U.S.-Mexico Border.”

2024. Council on Foreign Relations. <https://www.cfr.org/article/why-six-countries-account-most-migrants-us-mexico-border>.